



PUSAT  
EKONOMI & BISNIS  
SYARIAH



Ekonomi  
Syariah

# MENJAGA KEBERLANJUTAN DANA HAJI



**Rahmatina A. Kasri**

Kepala, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI)

Regular Sharia Discussion, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Jumat, 14 Juni 2024

**# ADAPTIVE, INNOVATIVE AND  
INSIGHTFUL**

 [pebs-febui.org](https://pebs-febui.org)

  PEBS FEB UI

  [pebsfebui](https://pebsfebui)

# Rahmatina Awaliah Kasri



## Occupation:

- Lecturer/Researcher FEB UI (2006-now)
- Director, Islamic Economics Undergraduate Program FEB UI (2015-2018)
- Director PEBS FEB UI (2018-now)

## Education:

- SE (BA), Economics, FEUI (2002)
- PgDipl (Post-Graduate Diploma), Economics, Australian National University (2004)
- MIDEc in International & Development Economics, Australian National University (2005)
- MBA in Islamic Banking and Finance, International Islamic University of Malaysia (2008)
- PhD in Islamic Economics and Finance, Durham University, United Kingdom (2015)

## Research Interest:

Islamic economics, development studies, Islamic social finance, Islamic banking and finance, Islamic economic thought.

*Scopus ID: 36622333500; SINTA ID : 6037974; <https://scholar.google.com/citations?user=tqInz58AAAAJ&hl=en>*

## Publications (2010-2023):

- 95 journal articles, 10 book chapters, 3 book editor, 2 modules, 1 book.
- Book: Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam I (History of Islamic Civilization and Economic Thoughts) I (2021)

## Other Affiliations:

- Chairwoman of Indonesian Association of Islamic Economist (IAEI) of DKI Jakarta Province; Member of Expert Board, DPP Islamic Economic Society (MES) of Indonesia; Member of Indonesian Association of Economist (ISEI)
- Member, International Association of Islamic Economist, UK & Society for the Advancement of Socio Economics, Germany
- Associate Editor, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management (Emerald), Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (BI), International Journal of Financial System (OJK) and editors in several international and international journals

**Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS)** merupakan lembaga di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang didedikasikan untuk menjadi *center of excellence* bagi penelitian, pelatihan, konsultasi, serta pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi pembangunan secara umum sesuai kebutuhan akademik, regulator, industri, dan masyarakat.

### Penelitian, Konsultasi dan Advokasi



**Output:** Research Based Policy, Market Research, Monev and Feasibility Study, Consultancy & Advisory

### Pelatihan

Professional Training

Executive Education

Mini MBA in IEF\*

IE Summer School

Peserta

Sejak Tahun 2023, PEBS FEB UI menyelenggarakan berbagai pelatihan dengan **6992 Peserta**.

Tingkat Kepuasan Peserta Tinggi: Konsisten > 4,5 dari skala 5 (Puas dan Sangat Puas)

### Pengabdian Masyarakat



Peningkatan literasi ekonomi syariah melalui program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan

Dari tahun 2020-2023, rangkaian kegiatan Pengmas dihadiri **8468 peserta**.

## Flagship Program



Policy Brief



Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO)



Islamic Economics Summer School (IESS)



Santripreneur



PEBS Wise

# Pendahuluan

---



Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH setiap tahun mengalami peningkatan. Pada akhir 2023 dana haji yang dikelola mencapai **Rp166 triliun**.



Di sisi lain, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) juga selalu mengalami peningkatan. Tahun 2024 ini, BPIH yang ditetapkan sebesar **Rp 93,4 juta**.



Pada periode 2014-2023 jamaah menanggung **56%** dari BPIH tersebut. Sementara sisanya bersumber dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.



Kondisi ini memunculkan persoalan keberlangsungan (*going concern*) dari pengelolaan dana haji di masa mendatang.

# Sekilas Mengenai Pengelolaan Dana Haji di Indonesia



Pengelolaan dana haji di Indonesia di atur dalam **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji**

- Mengatur pengelolaan keuangan haji di Indonesia.
- Menetapkan pembentukan BPKH sebagai lembaga independen yang mengelola dana haji pada 2017.

## Badan Pengelola Keuangan Haji

- **Visi:** "Menjadi lembaga pengelola keuangan haji yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan masyarakat."

### ➤ Misi

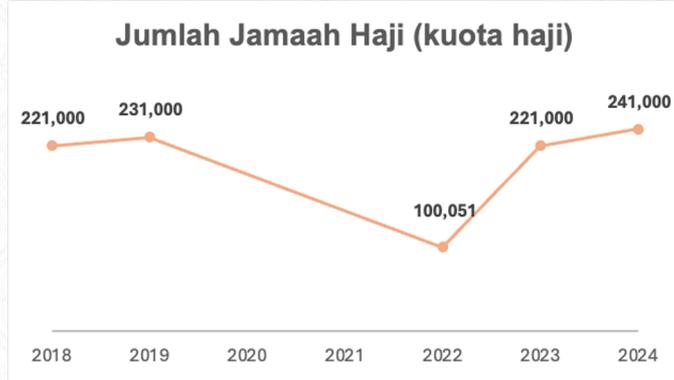
- Pengelolaan Profesional dan Syariah
- Peningkatan Pelayanan Haji
- Transparansi dan Akuntabilitas
- Kesejahteraan Jemaah dan Masyarakat
- Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

# Perbandingan Pengelolaan Haji

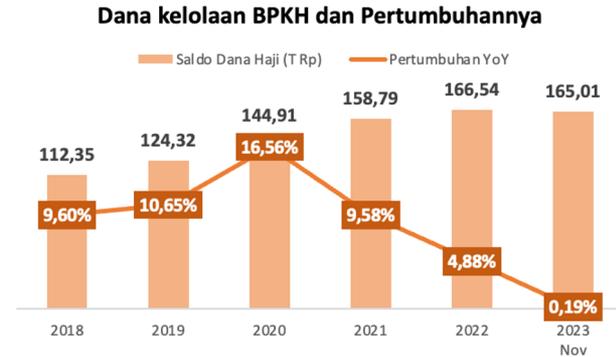
	Malaysia	Indonesia	Pakistan	India	Maladewa
Awal penerapan	1963	1999, 2004, 2014, 2018	2005	2002	2013
Cakupan Pengelolaan	Manajemen haji & pengelolaan dana haji	Manajemen haji (Kemenag) & pengelolaan keuangan haji (BPKH)	Manajemen haji & pengelolaan dana haji	Manajemen haji & pengelolaan dana haji	Manajemen haji & pengelolaan dana haji
Lembaga	Lembaga Tabung Haji	Kemenag, BPKH, dan swasta	MORA & Hajj Group Operator	Hajj Committee of India & Private Tour Operator	Maldives Hajj Cooperation Ltd & Private Hajj Tour
Alokasi investasi dana haji	Investasi langsung, instrumen keuangan syariah	Investasi langsung, instrumen keuangan syariah	Produk perbankan syariah	Instrumen keuangan syariah	Investasi syariah
Jumlah jamaah (kuota) haji	31,600	221,000	200,000	200,000	2,000

# Perkembangan Pengelolaan Dana Haji

Jumlah kuota haji dan biaya haji terus meningkat tiap tahunnya



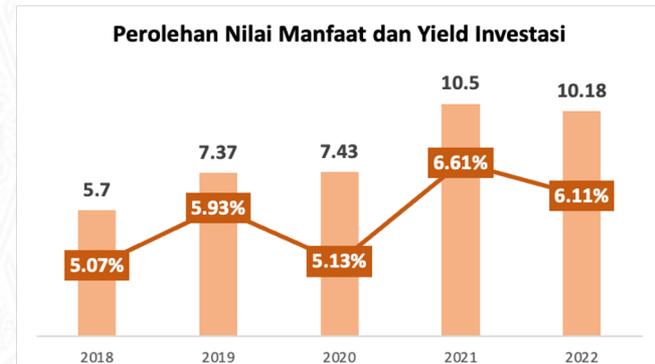
Perolehan nilai manfaat dana kelolaan BPKH juga terus meningkat



## Rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015 – 2024

(dalam juta rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	2024
<b>BIPIH (jamaah)</b>	37,49	34,6	34,89	35,24	35,24	39,89	49,9	56
<b>Dana Manfaat (BPKH)</b>	24,07	25,4	26,9	33,72	33,92	57,91	40,2	37,4
<b>BPIH</b>	61,56	60	61,79	68,96	69,16	97,8	90,1	93,4



# Mengapa Dana Haji harus dikelola?

---

Size populasi umat Islam seluruh dunia besar dan terus bertambah

- Kapasitas Masjidil Haram terbatas
- Konsekuensi: antrian calon jamaah (skema *at cost* atau dengan *financial assistance*)

Kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji

Perubahan kondisi makroekonomi

Dana haji yang mengendap berjumlah besar:

- Syarat setoran awal (*deposit*) agar dapat nomor antrian

Secara keuangan, sangat memungkinkan mengelola dana haji (setoran awal) dengan optimal

- *Time horizon* untuk investasi: jangka menengah – panjang
- Membuat biaya haji menjadi lebih efisien

Potensi ekonomi haji yang sangat besar

- Berbagai manfaat: mendukung industry keuangan syariah, ekosistem halal, dsb

Mencegah *moral hazard* dan *fraud*

# Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberlanjutan Pengelolaan Dana Haji

## Internal

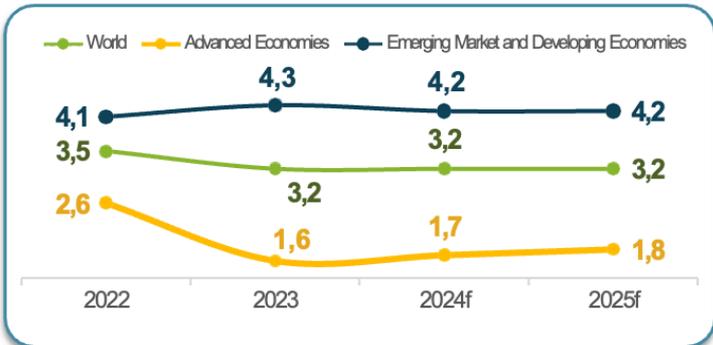
- Kepemimpinan dan manajemen
- Sumber Daya Manusia
- Manajemen Resiko dan Investasi
- Sistem dan Proses Operasional
- Kepatuhan dan Tata Kelola (Transparansi dan Akuntabilitas)

## Eksternal

- Kondisi makroekonomi: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga, nilai tukar
- Kondisi pasar keuangan dan harga komoditas
- Kebijakan pemerintah (fiskal dan moneter) dan regulasi
- Stabilitas Politik
- Hubungan Diplomatik

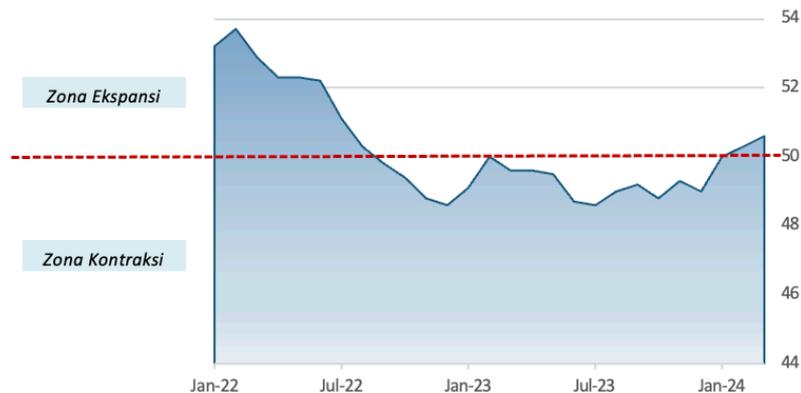
# EKONOMI GLOBAL TUMBUH STABIL, AKTIVITAS BISNIS EKSPANSIF

## Pertumbuhan Ekonomi Global, 2022—2025f



Sumber: IMF World Economic Outlook (April 2024)

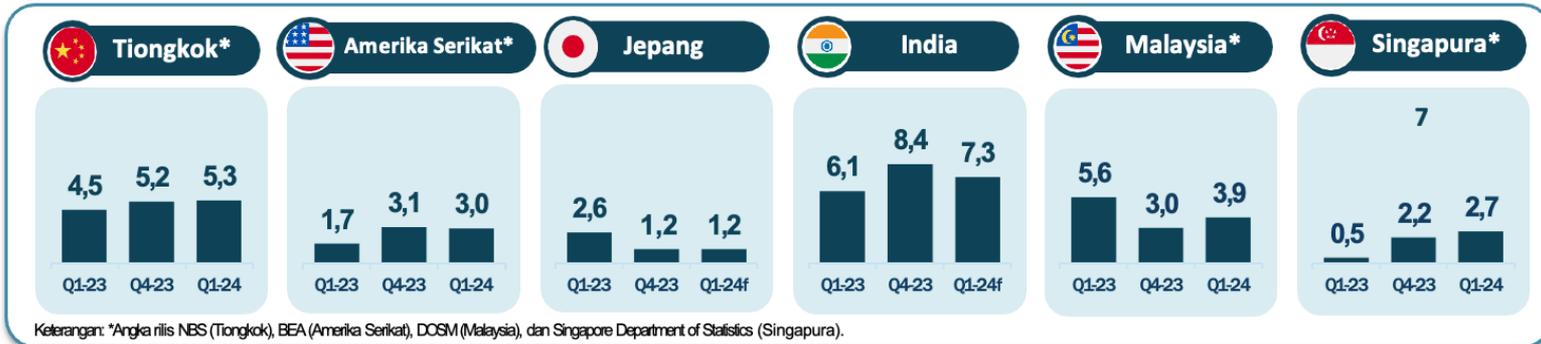
## Perkembangan PMI Manufaktur Global, Januari 2022-Maret 2024



Sumber: Trading Economics

“ Selama Januari – Maret 2024, aktivitas bisnis global berada di **zona ekspansif**. Pada Maret 2024, PMI Manufaktur negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok (51,1), India (59,1) dan Amerika Serikat (51,9) berada di **zona ekspansif**. ”

## Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama Indonesia (% , y-on-y)



Keterangan: \*Angka rilis NBS (Tiongkok), BEA (Amerika Serikat), DOSM (Malaysia), dan Singapore Department of Statistics (Singapura).

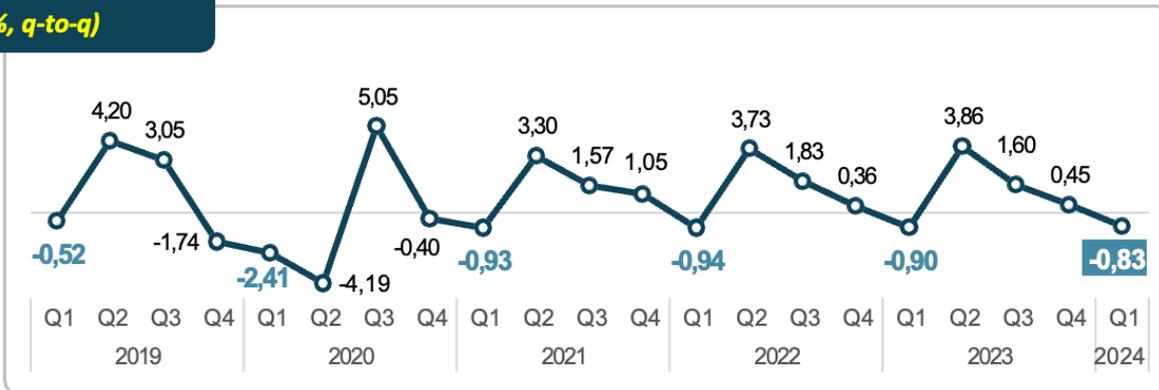
Sumber: Rilis Masing-Masing Negara, Trading Economics, dan IMF

“ Ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia **tumbuh** di tengah pertumbuhan ekonomi global yang **stabil** ”

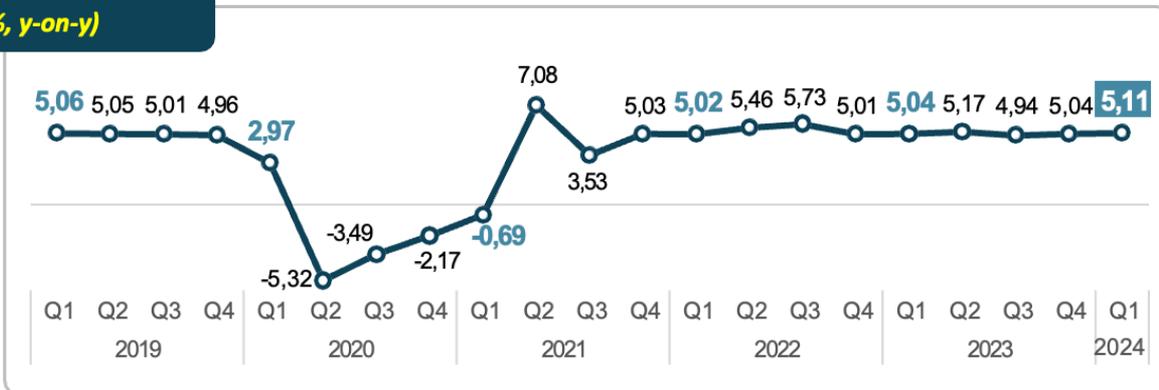


# EKONOMI INDONESIA TETAP TERJAGA DAN TUMBUH SOLID

Laju Pertumbuhan Ekonomi  
(%, q-to-q)



Laju Pertumbuhan Ekonomi  
(%, y-on-y)



Dibandingkan Triwulan 4-2023, ekonomi Indonesia pada Triwulan 1-2024 **terkontraksi sebesar 0,83% (q-to-q)**, mengikuti pola musiman tahun-tahun sebelumnya.

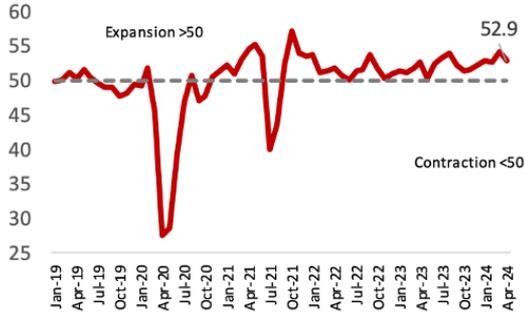


Ekonomi Indonesia **tumbuh positif sebesar 5,11% pada Triwulan 1-2024**, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023.

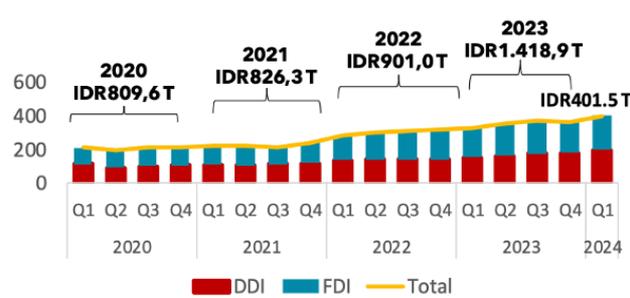
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Mei 2024

# INDIKATOR MAKRO EKONOMI INDONESIA TETAP TERJAGA DAN TUMBUH SOLID

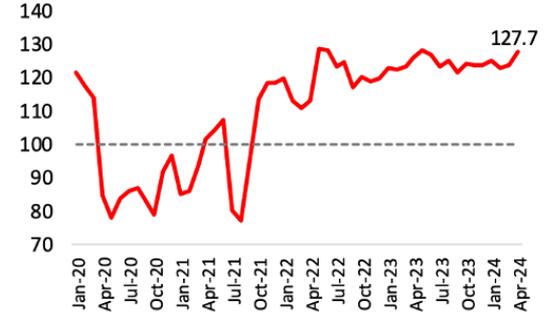
### S&P Global Indonesia Manufacturing PMI



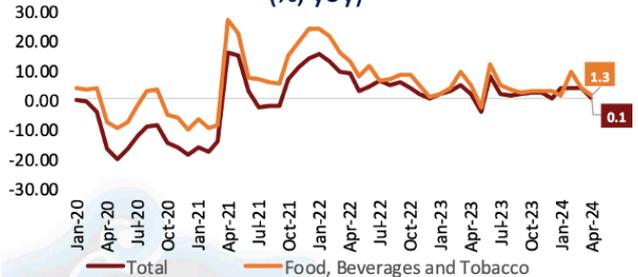
### Total Investment (Trillion Rupiah)



### Consumer Confidence Index



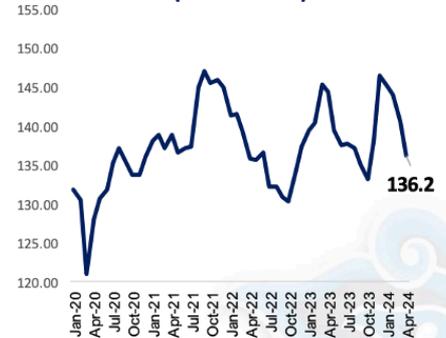
### Retail Sales (% yoy)



### Trade Balance (USD Billion)



### Foreign Exchange Reserves (Billion USD)



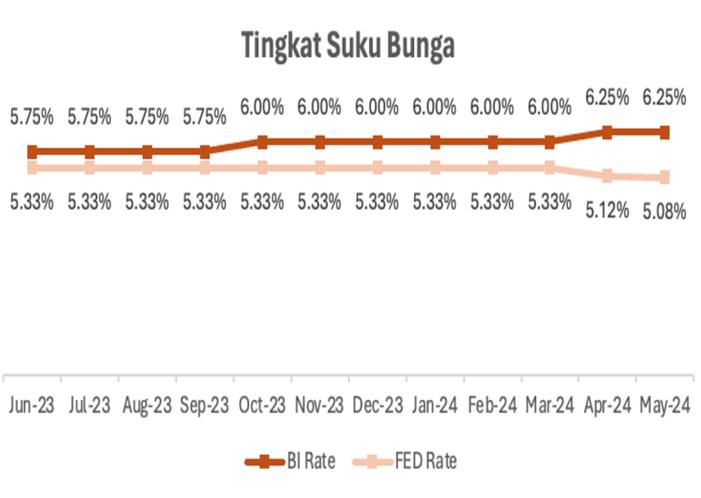
# Tingkat suku bunga cenderung naik, yang selanjutnya mempengaruhi proses pengelolaan dana haji khususnya imbal hasil investasi dana haji

## Faktor pengaruh keberlangsungan:

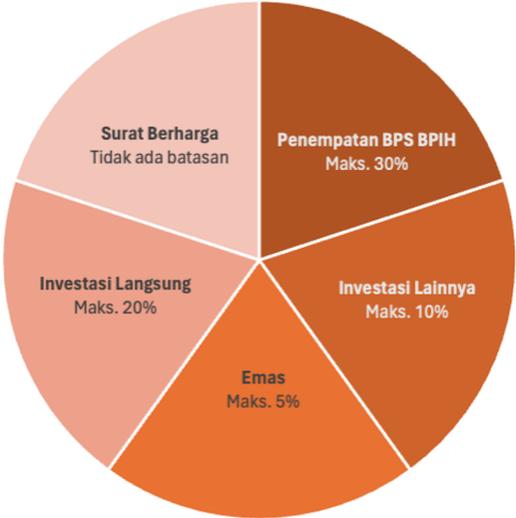
### Imbal hasil investasi

- a. Tingkat suku bunga
- b. Alokasi penempatan investasi dana haji-  
Batasan alokasi investasi BPKH diatur oleh PP No. 5 Tahun 2018

Tingkat suku bunga yang tinggi mendorong kenaikan imbal hasil, karena lebih dari 50% portofolio BPKH berbentuk surat berharga



## Alokasi Penempatan Dana BPKH berdasarkan PP No 5 Tahun 2018



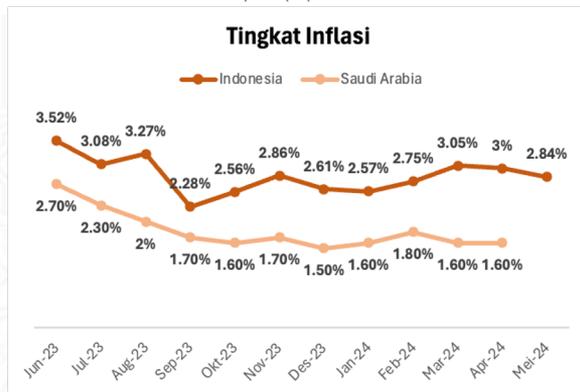
# Kurs valas dan laju inflasi juga sangat mempengaruhi besarnya dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji

Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dana haji:

- 1) Biaya perjalanan haji (BPIH)**  
BPIH yang ditetapkan harus mencakup seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan jamaah haji. Jumlah BPIH sangat bergantung pada kurs valas dan inflasi.
- 2) Proporsi BPIH yang ditanggung BPKH**  
Komponen biaya yang ditanggung dihasilkan dari imbal hasil investasi BPKH (dana manfaat)
- 3) Jumlah kuota haji**  
Penentuan kuota haji didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia.



Fluktuasi kurs valas mempengaruhi biaya perjalanan ibadah haji. 60% komponen biaya haji merupakan valas (terutama USD dan SAR)

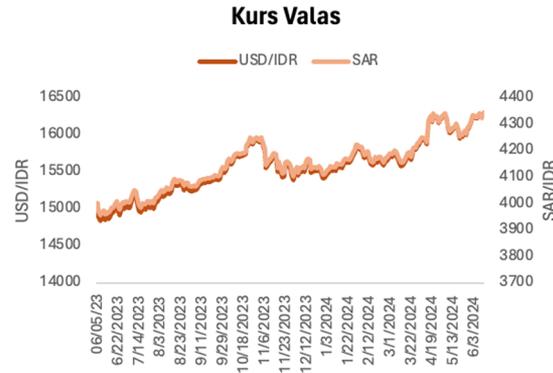


Tingkat inflasi mempengaruhi perkembangan BPIH. Dengan adanya inflasi yang berlanjut, biaya penyelenggaraan haji akan terus meningkat.

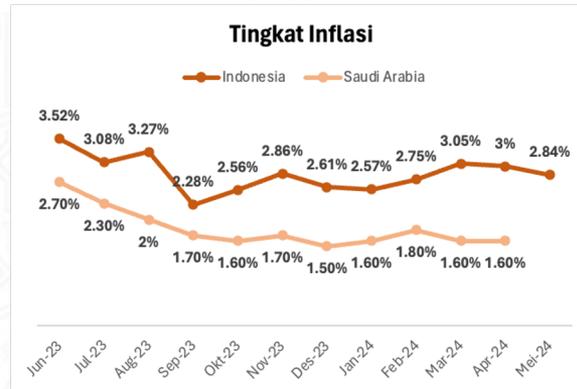
# Dana haji yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji juga bergantung pada kurs valas dan inflasi

## Faktor pengaruh keberlangsungan:

- 1) Biaya perjalanan haji (BPIH)**  
BPIH yang ditetapkan harus mencakup seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan jamaah haji. Jumlah BPIH sangat bergantung pada kurs valas dan inflasi.
- 2) Proporsi BPIH yang ditanggung BPKH**  
Komponen biaya yang ditanggung dihasilkan dari imbal hasil investasi BPKH (dana manfaat)
- 3) Jumlah kuota haji**  
Penentuan kuota haji didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara pengirim jamaah haji, termasuk Indonesia.



Fluktuasi kurs valas mempengaruhi biaya perjalanan ibadah haji. **60% komponen biaya haji merupakan valas**



Tingkat inflasi mempengaruhi perkembangan BPIH. Dengan adanya inflasi yang berlanjut, biaya penyelenggaraan haji akan terus meningkat.

# Studi Kasus Keberlanjutan (Sustainability) Dana Haji



Kajian PEBS FEB UI bersama BPKH menunjukkan beberapa faktor penting dalam *sustainability* dana haji:

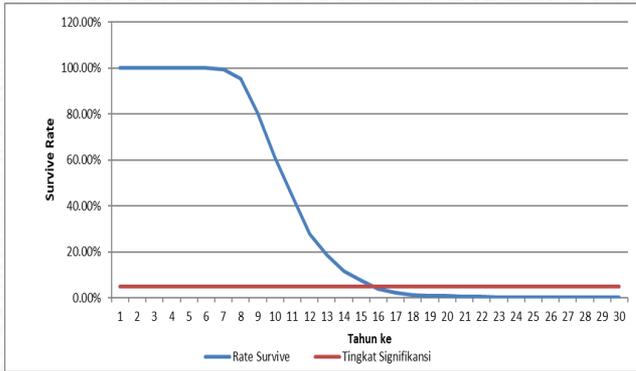
- Kuota haji
- Persentase dana haji yang dibayar jamaah (BIPIH atau *financial assistance by BPKH*)
- Laju peningkatan biaya haji
- Laju imbal hasil investasi dana haji (yang dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi)



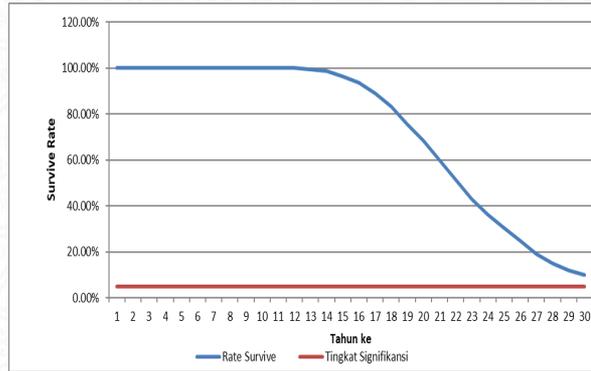
Hasil simulasi menunjukkan faktor kuota haji dan persentase *financial assistance* merupakan faktor dengan pengaruh terbesar terhadap *sustainability* dana haji:

- Durasi *sustainability* berkurang drastis ketika terjadi peningkatan kuota haji dan persentase *financial assistance* biaya haji tinggi jika tidak diimbangi dengan return investasi (manfaat dana haji) yang tinggi.

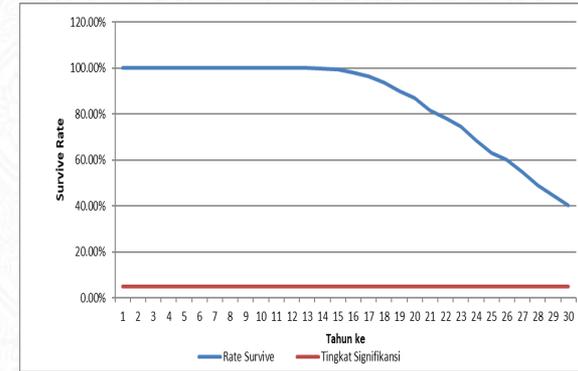
# Simulasi Keberlanjutan Dana Haji 2023



**Skenario 55:45**  
Rp54.4juta:Rp44.51 juta



**Skenario 70:30**  
Rp69.23juta:Rp29.67 juta



**Skenario 55:45 dengan return  
investasi 10%**

- Skenario yang dipilih akan berdampak langsung pada *sustainability* pengelolaan dana haji.
- Dengan asumsi *yield* BPKH 6.2% (2022), jika digunakan skenario rasio BIPIH:Dana Manfaat sebesar 55:45, *sustainability* dana haji terjaga sampai sekitar 15 tahun
- Pada skenario 70:30, *sustainability* dana haji menjadi lebih panjang yaitu mencapai 30 tahun.
- Jika skenario 55:45 ingin digunakan namun *sustainability* ingin diperpanjang, maka return investasi harus ditingkatkan.

# Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Haji di Masa Depan

Ke depan, untuk memastikan dana haji tersebut dikelola dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan masyarakat. arah kebijakan pengelolaan dana haji bisa berfokus pada beberapa aspek sebagai berikut.



## Diversifikasi Investasi

- **Diversifikasi Portofolio:** Mengalokasikan dana haji ke berbagai instrumen investasi yang berbeda untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Instrumen ini bisa meliputi deposito syariah, sukuk, reksa dana syariah, properti, dan proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.
- **Investasi di Sektor Riil:** Fokus pada investasi di sektor riil yang stabil dan menguntungkan seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan proyek pembangunan yang dapat memberikan imbal hasil jangka panjang.



## Penguatan Dukungan Pemerintah

Pemerintah menjaga kestabilan makroekonomi nasional melalui bauan kebijakan fiskal dan moneter.



## Penguatan Manajemen Risiko

- **Identifikasi dan Mitigasi Risiko:** Mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan investasi dan operasional pengelolaan dana haji.
- **Kebijakan Risiko yang Adaptif:** Menerapkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi perubahan kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya.



## Pengembangan Teknologi Informasi

- **Digitalisasi Proses:** Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana, mulai dari pendaftaran jemaah hingga pelaporan keuangan dan pemantauan investasi.
- **Keamanan Data:** Memastikan sistem teknologi informasi yang digunakan memiliki tingkat keamanan tinggi untuk melindungi data keuangan dan informasi pribadi jemaah haji.

# Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Haji di Masa Depan

Arah kebijakan pengelolaan dana haji di masa mendatang oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) berfokus pada beberapa aspek utama untuk memastikan dana tersebut dikelola dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan masyarakat. Berikut adalah beberapa arah kebijakan utama yang dapat diambil:



## Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

- **Tata Kelola yang Baik:** Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta membuka akses informasi kepada publik untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.



## Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- **Pelatihan dan Pengembangan:** Meningkatkan kompetensi dan keahlian staf melalui pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan profesional di bidang investasi syariah, manajemen keuangan, dan pengelolaan dana.
- **Kesejahteraan Karyawan:** Menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.



## Penguatan Regulasi Haji

Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan regulasi untuk memperkuat kelembagaan BPKH, serta mendukung kinerja investasi pengelola dana haji.



PUSAT  
EKONOMI & BISNIS  
SYARIAH



Ekonomi  
Syariah



# THANK YOU

**#** ADAPTIVE, INNOVATIVE AND  
INSIGHTFUL

 [pebs-febui.org](https://pebs-febui.org)

  PEBS FEB UI

  [pebsfebui](https://pebsfebuilink.com)

# Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Haji di Masa Depan

Ke depan, untuk memastikan dana haji tersebut dikelola dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan masyarakat. arah kebijakan pengelolaan dana haji bisa berfokus pada beberapa aspek sebagai berikut.



## Diversifikasi Investasi

- **Diversifikasi Portofolio:** Mengalokasikan dana haji ke berbagai instrumen investasi yang berbeda untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Instrumen ini bisa meliputi deposito syariah, sukuk, reksa dana syariah, properti, dan proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.
- **Investasi di Sektor Riil:** Fokus pada investasi di sektor riil yang stabil dan menguntungkan seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan proyek pembangunan yang dapat memberikan imbal hasil jangka panjang.



## Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

- **Tata Kelola yang Baik:** Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta membuka akses informasi kepada publik untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.



## Pengembangan Teknologi Informasi

- **Digitalisasi Proses:** Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana, mulai dari pendaftaran jemaah hingga pelaporan keuangan dan pemantauan investasi.
- **Keamanan Data:** Memastikan sistem teknologi informasi yang digunakan memiliki tingkat keamanan tinggi untuk melindungi data keuangan dan informasi pribadi jemaah haji.

# Arah Kebijakan Pengelolaan Dana Haji di Masa Depan

Arah kebijakan pengelolaan dana haji di masa mendatang oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) berfokus pada beberapa aspek utama untuk memastikan dana tersebut dikelola dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan masyarakat. Berikut adalah beberapa arah kebijakan utama yang dapat diambil:



## Penguatan Manajemen Risiko

- **Identifikasi dan Mitigasi Risiko:** Mengembangkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang terkait dengan investasi dan operasional pengelolaan dana haji.
- **Kebijakan Risiko yang Adaptif:** Menerapkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi perubahan kondisi pasar dan faktor eksternal lainnya.



## Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- **Pelatihan dan Pengembangan:** Meningkatkan kompetensi dan keahlian staf melalui pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan profesional di bidang investasi syariah, manajemen keuangan, dan pengelolaan dana.
- **Kesejahteraan Karyawan:** Menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.

## Kapasitas Sumber Daya